

# Analisis Finansial dan Performa Kelembagaan Mendukung Pengembangan Subsistem Agribisnis Hilir Di Kota Metro

## *Financial and Performa Analysis Institute Support Development of Subsistem Downstream Agribisnis in Metro*

Sri Indaryati<sup>1\*</sup> dan Dayang Berliana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Sain dan Teknologi, Universitas Nahdlatul Ulama Lampung

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung

\*E-mail : sriindar2774.gmail.com

### ABSTRACT

*Agriculture policy in downstream sector area mechanize of agriculture is adequate not yet. Institute service restructuring and enables of the farmer through enables of the local institute and also farmer organization represents effort overcome difficulty of institute gapoktan. Method of the research with sampling random stratified and descriptive qualitative with case study design, compose primary data and sekunder data. Eligibility effort of agribusiness downstream service activities management of competent Rice milling Unit category there are group melati 2 NPV=5,31, Net B /C=3,67, Gross of B/C=6,33, IRR=15%, Pp=1,96 and of ROI 8,53 Year.*

*Keyword: Policy, downstream, agribusiness, eligibility*

**Disubmit** : 03 Maret 2021, **Diterima**: 24 Agustus 2021, **Disetujui** : 29 Desember 2021

### PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian berwawasan agribisnis bertujuan membangun sistem dan usaha pertanian yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi serta pemberdayaan petani. Keberlangsungan pembangunan pertanian ini membutuhkan dukungan mekanisasi pertanian (Aldillah, 2016). Pengembangan mekanisasi pertanian di Indonesia dilakukan melalui akselerasi bantuan alsintan Upaya Khusus (Upsus) padi, jagung dan kedelai (Pajale) meliputi *rice transplanter*, *rice milling Unit*, pompa air, dan alsintan panen dan pascapanen seperti *combine harvester*, *power thresher*, *dryer*, dan *corn sheler* (Ditjen PSP, 2015). Bantuan alsintan yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal atau bahkan tidak dimanfaatkan diantaranya dengan kasus belum mampu mengelola secara optimal dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan (Purwantini dan Susilowati, 2018).

Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok dalam keseluruhan rancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan. Permasalahan Kelembagaan merupakan bagian yang esensial, baik kelembagaan ditingkat makro maupun ditingkat mikro. Gapoktan merupakan salah satu kelembagaan mikro di setiap desa. Gapoktan menjadi lembaga gerbang (*gate way institution*) yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain diluarnya. Peranan kelembagaan dalam sistem agribisnis sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di masa depan (Nuraini, 2016)



**Lisensi**

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Terkait dengan kebijakan pertanian di sektor hilir sampai saat ini status mekanisasi pertanian dalam menunjang pengembangan pertanian belum memadai. Keberadaan mekanisasi pertanian yang di berikan pemerintah dalam bantuan sebagai implementasi kebijakan hilir belum memperoleh manfaat dalam menumbuhkan produktivitas baik pada sumber daya lahan dan tenaga kerja, peningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan mutu dan belum mampu mendorong kemitraan gapoktan dengan industri pengelola agribisnis Hilir. Kinerja kelembagaan pangan belum memenuhi harapan hal ini disebabkan pengelola kelembagaan tersebut tidak berasal dari populasi individu yang memiliki kemampuan pengelolaan kelembagaan dan bekal pengetahuan mekanisasi.

Kelompok lumbung pangan masih sangat kurang dan sangat memerlukan pengetahuan manajerial untuk menjalankan unit usaha secara berkelompok. Kelembagaan lumbung Pangan terpilih mendapatkan bantuan RMU dalam penelitian ini belum memiliki kemampuan melaksanakan unsur-unsur kelambagaan yang sedang berjalan unit tujuannya. Selanjutnya unsur-unsur kelembagaan sebagai pengelola belum memiliki kesiapan sesuai peran dan fungsinya misalnya pada pengurus, anggota, tenaga teknis, petugas terkait dan pejabat setempat. Salah satu paket yang terkait dengan permasalahan pengelolaan industri hilir adalah restrukturisasi lembaga pelayanan dan pemberdayaan petani melalui pemberdayaan kelembagaan organisasi petani dan Gabungan Kelompok tani, sehingga kelembagaan tersebut terintegrasi antara subsistem satu dengan subsistem yang lain, karena aspek kelembagaan merupakan syarat pokok agar struktur agribisnis menjadi sistem agribisnis yang terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan. Upaya pemerintah dengan memberikan bantuan mekanisasi pertanian kepada kelompok tani diharapkan memperkuat kelembagaan petani sebagai Usaha Pelayanan Jasa Alsitran (UPJA) (Kendarto, 2016). Usaha jasa dan peralatan mesin pertanian berperan meningkatkan produksi, keuntungan petani, mengatasi tenaga kerja dan percepatan proses produksi pertanian (Rukmana et al., 2021). Lebih lanjut Ismail, Khairizal, & Wahyudy, (2018) menyatakan jenis mesin pertanian yang banyak digunakan petani kecil terdiri dari hand traktor, pompa air, mesin perontok dan mesin penggiling (RMU). Pelaku usaha alat dan mesin pertanian selain berperan sebagai subjek juga sebagai objek oleh sebab itu harus aktif mendukung dan mempengaruhi pasar dan peningkatan peran pemerintah supaya daya saing terus meningkat dan kualitas tetap bertahan (Mulatsih, 2016)

Tabel 1. Kapasitas RMU yang diperbantukan kepada kelompok lumbung memiliki spesifikasi sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1	Kapasitas olah Mesin per hari	a*= Kapasitas RMU per jam 600kg satu hari bisa operasional 8
2	Sesuai umur ekonomis kapasitas ialah mesin	jam jadi dalam satu hari kapasitas giling= 4.800 kg b*= Sesuai umur ekonomis kapasitas mesin 720.000 kg dengan 5 tahun kerja
3	Penerimaan	c*= Penerimaan adalah harga ongkos jasa rp 100,00/kg (perubahan harga baru Rp.320,00/kg) di kali potensi kapasitas mesin (720.000) rp 72.000.000,00

Kebijakan pengembangan usaha agribisnis merupakan program pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan kinerja Gapoktan. Pemberdayaan kelembagaan tersebut berada dalam kontek penguatan kelembagaan baik secara langsung pada kelompok tani, kelembagaan usaha maupun pemerintah, dengan tujuan unit komponen kelembagaan dapat berfungsi sesuai perannya. Berdasarkan uraian tersebut, menentukan tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis kelayakan usaha agribisnis hilir pelayanan jasa pengelolaan Rice Milling Unit (RMU) pada kelembagaan pertanian (kelompok tani/lumbung pangan) di Kota

Metro dan (2) Mengetahui performa sistem kelembagaan yang mampu mengembangkan agribisnis hilir di Kota Metro.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Metro. Pemilihan lokasi ditentukan secara sengaja (*purposive*). Berdasarkan laporan kegiatan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota Metro yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Metode pengambilan contoh dengan acak distrafikasi (*startified random sampling*). Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Maret sampai dengan Bulan Mei 2018.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus, terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Populasi Kelompok lumbung penerima kebijakan pengembangan agribisnis hilir dibagi dalam 3(tiga) kategori, yaitu kelompok lumbung kategori dinamis, kurang dinamis dan statis.

**Metode Pengolahan dan Analisis data.** Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Tujuan pertama menganalisis kelayakan usaha agribisnis hilir pelayanan jasa pengelolaan Rice milling Unit (RMU) pada kelembagaan pertanian (kelompok tani/lumbung pangan) di Kota Metro secara Analisis kelayakan finansial yaitu menghitung tingkat imbalan yang diterima dari modal yang sudah diinvestasikan pada usaha RMU. Kriteria investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Net Benefit Cost Rasio* (Net B/C), *Gross Benefit Cost Ratio* (Gross B/C), *Payback Periode*, *Net Present Value*, *Internal Rate of Return*, (Gray, 1999) dan tujuan kedua mengetahui performa sistem kelembagaan yang mampu mengembangkan agribisnis hilir di Kota Metro dengan pendekatan deskriptif kuantitatif Pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu membandingkan standar implementasi dengan pelaksanaan unsur kelembagaan yang terjadi pada lumbung pangan penerima bantuan RMU meliputi unsur Batas yuridikasi, Aturan representasi, Orgasnisasi, Hak pemilikan, Rekayasa kelembagaan dan Performa kelembagaan. Performa kelembagaan merupakan potensi pendukung unit usaha rice milling unit untuk meningkatkan akses pelayanan jasa dan pemasaran memenuhi kebutuhan konsumen (Indaryanti, 2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kelayakan finansial menjadikan pengusaha terutama skala rumahtangga dapat merencanakan hingga mengembangkan usaha berlandaskan data usaha sebelumnya sebagai rujukan penanganan resiko. (Tasik et al., 2020) . Perhitungan kelayakan usaha sebagai pengamanan investasi (Mulyani, Umay., Yusmini & Edwina, 2016). Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan setelah dilakukan pengolahan, yaitu berupa analisis finansial pada perhitungan digunakan suku bunga 18% per tahun suku bunga yang berlaku pada BRI Cabang Kota Metro untuk Kredit Usaha Rakyat. dihasilkan nilai finansial aktual seperti terdapat pada Tabel 1 berikut ini.

Secara keseluruhan analisis kelayakan finansial NPV, Net B/C, Gross B/C, IRR PP dan ROI Pada kelompok Rukun Sentosa tidak dapat diketahui (0) karena kelembagaan ini tidak terjadi aktifitas produksi.

**Net Present Value (NPV).** Berdasarkan hasil analisis Tabel 1 bahwa nilai NPV yang terjadi pada unit RMU Kelompok lumbung pangan Melati2 bernilai 5,31 dan kelompok lumbung pangan Margo Makmur 4,34 dengan *compound* dan *discount* faktor (cf/df) sebesar 18% per tahun yang berarti NPV lebih dari nol (NPV>0). Dengan demikian berarti penerimaan bersih unit usaha RMU dalam pelayanan jasa lebih dari total biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, aktivitas usaha yang dilakukan oleh kelompok lumbung pangan pengelola unit RMU Melati2 dan Margo Makmur menguntungkan secara finansial.

**Net B/C.** Net B/C digunakan untuk mengetahui perbandingan antara manfaat bersih dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan jasa RMU, maka didapatkan nilai net B/C pada kelompok lumbung pangan Melati2 3,67 dan kelompok lumbung pangan Margo Makmur 3,47 dari perhitungan Net B/C dengan *coumpound* dan *discount* faktor (cf/df) sebesar 18% artinya setiap rupiah yang ditanam untuk modal investasi

akan menghasilkan manfaat. Berdasarkan analisis finansial dengan nilai B/C lebih dari satu (net B/C >1) maka unit usaha RMU secara finansial memiliki potensi yang lebih menguntungkan.

Tabel 2. Analisis finansial aktual pada unit kelompok lumbung pangan pengelola RMU

No	Analisis Finansial	Tingkat Suku Bunga 18%		
		Kelompok lumbung pangan Melati2	Kelompok lumbung pangan Margo Makmur	Kelompok lumbung pangan Rukun Sentosa
1.	NPV	5,31	4,34	0
2.	Net B/C	3,67	3,47	0
3.	Gross B/C	6,33	2,44	0
4.	IRR	15%	5%	0
5.	Pp	1,96	1,95	0
6.	ROI	8,53 tahun 102,24 bulan	18,8750 tahun 226 bulan	0

Sumber: Pengolahan data primer, (2018).

**Gross B/C.** Gross B/C digunakan untuk mengetahui perbandingan antara penerimaan manfaat suatu investasi dengan biaya yang telah dikeluarkan, maka didapatkan nilai Gross B/C pada kelompok lumbung pangan Melati2 6,33 dan kelompok lumbung pangan Margo Makmur 2,44 dari perhitungan Gross B/C dengan compound dan discount faktor (cf/df) sebesar 18% artinya setiap rupiah yang ditanam untuk modal investasi akan menghasilkan manfaat. Berdasarkan analisis finansial dengan nilai Gross B/C lebih dari satu (Gross B/C >1) maka unit usaha RMU secara finansial menguntungkan.

**Internal Rate Of Return.** Tingkat pengembalian internal adalah suatu tingkat pengembalian yang dinyatakan dalam persen yang identik dengan ongkos investasi unit RMU, maka nilai IRR pada kelompok lumbung pangan Melati2 15% dan kelompok lumbung pangan Margo Makmur 5% memiliki nilai IRR > sosial discount rate dalam kondisi ini unit RMU menguntungkan karena nampak besarnya keuntungan, unit usaha bisa terus dijalankan dengan memperbaiki jumlah penerimaannya.

**Payback period (Pp).** Payback period merupakan penilaian investasi suatu proyek yang didasarkan pada pelunasan biaya investasi berdasarkan manfaat bersih dari proyek, didapatkan nilai Pp pada kelompok lumbung pangan Melati2 adalah 1,94 tahun artinya sejumlah investasi yang digunakan pada unit usaha RMU memerlukan lama waktu pengembalian 1,94 tahun atau 23,28 bulan. Sedangkan nilai Pp pada kelompok lumbung pangan Margo Makmur adalah 1,95 tahun artinya sejumlah investasi yang digunakan pada unit usaha RMU memerlukan lama waktu pengembalian 1,95 tahun atau 23,04 bulan.

**Return Of Investment /ROI.** Return of Investment adalah ukuran profitabilitas yang didasarkan atas ratio antara pendapatan untuk kapital dengan total asset atau jumlah investasi yang digunakan dalam unit RMU, didapatkan nilai ROI pada kelompok lumbung pangan Melati2 adalah 3,27 tahun artinya sejumlah investasi yang digunakan pada unit usaha RMU memerlukan lama waktu pengembalian 8,53 tahun atau 102,24 bulan. Sedangkan nilai ROI pada kelompok lumbung pangan Margo Makmur adalah 18,870 tahun artinya sejumlah investasi yang digunakan pada unit usaha RMU memerlukan lama waktu pengembalian 18,80 tahun atau 226, bulan. Nilai ROI pada kelompok lumbung pangan Rukun Sentosa tidak bisa didapatkan karena kelembagaan ini tidak ada aktifitas.

Kondisi aktual diatas terjadi karena jumlah jam operasi penggunaan RMU berada jauh dibawah target, sehingga penerimaan sangat rendah. Performa unit RMU yang tidak sesuai harapan ini dipengaruhi oleh kelembagaan yang lemah, pembagian tugas pengurus, kejelasan tugas dan batas wewenang serta aturan seputar unit pengelolaan usaha ini belum berlaku dengan baik. Selain itu, karakteristik partisipan kurang didukung dengan rasa kebersamaan, sense of belonging dan loyalitas terhadap usaha pengembangan unit RMU terlebih

terhadap kelompok lumbung pangan. Upaya-upaya untuk memberdayakan potensi unit RMU sebagai bentuk usaha orientasi profit belum nampak dilakukan oleh kelompok lumbung pangan ini. Kondisi aktual semestinya pada pengelolaan lumbung pangan terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis finansial seharusnya kelompok lumbung pangan pengelola RMU

No	Analisis Finansial	Tingkat Suku Bunga 18%
1.	NPV	2,85
2.	<i>Net B/C</i>	188410,20
3.	<i>Gross B/C</i>	58,50
4.	IRR	91 %
5.	Pp	1,98
6.	ROI	2,14 tahun atau 25,73 bulan

Tabel 3 diketahui bahwa Nilai NPV seharusnya pada unit usaha RMU adalah sebesar 2,85 atau bernilai positif dari perhitungan dengan *compound* dan *discount* faktor (cf/df) sebesar 18% per tahun yang berarti NPV lebih dari nol ( $NPV > 0$ ). Hal tersebut berarti bahwa penerimaan bersih unit usaha RMU dalam pelayanan jasa lebih dari total biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan analisis *Net B/C* 188410,20 dari perhitungan *Net B/C* dengan *compound* dan *discount* faktor (cf/df) sebesar 18%. Berdasarkan analisis finansial dengan nilai *B/C* lebih dari satu ( $net B/C > 1$ ) artinya setiap rupiah yang ditanam untuk modal investasi akan menghasilkan manfaat maka unit usaha RMU secara finansial memiliki potensi yang lebih menguntungkan. *Gross B/C* 58,50 perhitungan *Gross B/C* dengan *compound* dan *discount* faktor (cf/df) sebesar 18%. Berdasarkan analisis finansial dengan nilai *Gross B/C* lebih dari satu ( $Gross B/C > 1$ ) artinya setiap rupiah yang ditanam untuk modal investasi akan menghasilkan manfaat maka unit usaha RMU secara finansial menguntungkan, IRR 91(cf/df) sebesar 18% per tahun yang berarti IRR lebih besar dari nol ( $IRR > 0$ ). Hal tersebut berarti penerimaan bersih unit usaha RMU dalam pelayanan jasa lebih dari pada total biaya yang dikeluarkan nilai  $IRR > \text{sosial discount rate}$  dalam kondisi ini unit RMU menguntungkan nampak besarnya keuntungan., perhitungan *Payback periode* dengan nilai Pp 1,98 sejumlah investasi yang digunakan pada unit usaha RMU memerlukan lama waktu pengembalian 1,94 tahun atau 23,28 bulan dan Perhitungan ROI 2,14 tahun atau 25,73 bulan artinya sejumlah investasi yang digunakan pada unit usaha RMU memerlukan lama waktu pengembalian 2,14 tahun atau 25,7 bulan. Dengan demikian, aktivitas usaha yang dilakukan oleh unit kelompok lumbung pangan yang seharusnya menguntungkan secara finansial dan layak untuk dikembangkan. Kondisi seharusnya perhitungan diatas merupakan gambaran bahwa unit usaha RMU mampu bertahan sesuai harapan jika ada perbaikan dalam hal peningkatan kapasitas teknis dan manajemen atau kelembagaan unit usaha RMU secara keseluruhan. Rendahnya kapasitas teknis pengelolaan jasa mesin pertanian karena belum sepenuhnya berorientasi bisnis dan pengelolaan dengan keterbatasan sumberdaya dan kurang kelengkapan fasilitas pendukung (Amalia et al., 2021). Dalam mempertahankan kelayakan finansial pada pengelolaan jasa mesin pertanian dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik, perawatan peralatan agar tetap terjaga layak pakai (Mesin et al., 2021).

**Biaya Transaksi.** Biaya yang ditimbulkan dalam melakukan transaksi ekonomi. Biaya untuk menentukan dan memberlakukan hak-hak kepemilikan atas barang dan jasa. Komponen biaya yang dikeluarkan pada kelompok lumbung pangan pengelola RMU selama kegiatan berlangsung terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4 diketahui bahwa komponen biaya transaksi dalam pengelolaan unit usaha lumbung pangan meliputi biaya pertemuan rutin, biaya administrasi dan biaya penerimaan bantuan. Biaya pertemuan rutin biasanya dikeluarkan untuk alokasi pembelian kue-kue dan minum (jajanan pasar, gorengan, minuman kopi/teh). Kisaran besarnya biaya tidak jauh berbeda antar kelompok pengelola yaitu kelompok tani Melati2

Rp. 300.000,00, Pada kelompok lumbung pangan Melati2 pertemuan rutin awal musim tanam berbarengan dengan kegiatan arisan keliling uang dan gabah, setiap anggota yang mendapat arisan sebagai ketempatan lokasi pertemuan dan rapat kelompok kelompok tani-kelompok lumbung pangan. Biaya yang dikeluarkan untuk rapat awal musim kelompok lumbung pangan Margo Makmur Rp 100.000-150.000 dan kelompok lumbung pangan Rukun Sentosa Rp 150.000,-. Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadministrasian kegiatan yang dialokasikan untuk pembelian alat tulis (surat menyurat, buku, pena, pensil, penggaris dan kertas). Besar biaya administrasi untuk kelompok lumbung pangan Melati2 Sebesar Rp 100.000, kelompok lumbung pangan Margo Makmur Rp 50.000 dan kelompok lumbung pangan Rukun Sentosa 0. Biaya penerima unit bantuan adalah biaya tidak resmi yang dikeluarkan kelompok berdasarkan kesepakatan sebagai penerima bantuan, kesepakatan yang pertama saat penyerahan unit RMU dan kesepakatan kedua saat penerimaan bantuan modal besarnya dana penerimaan bantuan ini sama pada semua kelompok lumbung pangan penerima bantuan ( Melati2, Margo Makmur dan Rukun Sentosa) saat penerimaan RMU Rp 500.000,00 -Rp. 1.500.000,00 dan diserahkan kepada petugas. Sumber pembiayaan biaya transaksi dikelompok lumbung pangan adalah uang kas kelompok pengurus mengambil dari uang kas kelompok yang dengan pemberitahuan kepada anggota bahwa ada pengeluaran terkait dengan pembiayaan-pembiayaan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan pada gapoktan sebagai pengelola bantuan pemerintah mengurangi modal oleh sebab itu perlu penyederhanaan prosedur sehingga mengurangi dan menekan biaya transaksi(Zulkarnain & Mangiring, 2018).Biaya transaksi yang dikeluarkan lembaga tani dengan serendah-rendahnya namun tetap memberikan nilai keuntungan (Keumala Fadhiela, Rachmina Dwi, 2018).

Tabel 4. Komponen biaya dan kisaran besarnya rupiah yang dikeluarkan kelompok lumbung pangan per periode kegiatan.

No	Biaya Transaksi	Kelompok Lumbung pangan Melati 2	Kelompok Lumbung pangan Margo Makmur	Kelompok Lumbung pangan Rukun Sentosa
1.	Pertemuan rutin	0-300.000	100.000-150.000	0-150.000
2.	Administrasi	100.000	50.000	0
3.	Transpot koordinasi	50.000	0	0
4.	Sebagai penerima unit Bantuan*	500.000-1.500.000	500.000-1.500.000	500.000-1.500.000

Sumber: Data primer , (2018).

Keterangan= \*= Sekali selama kegiatan berlangsung

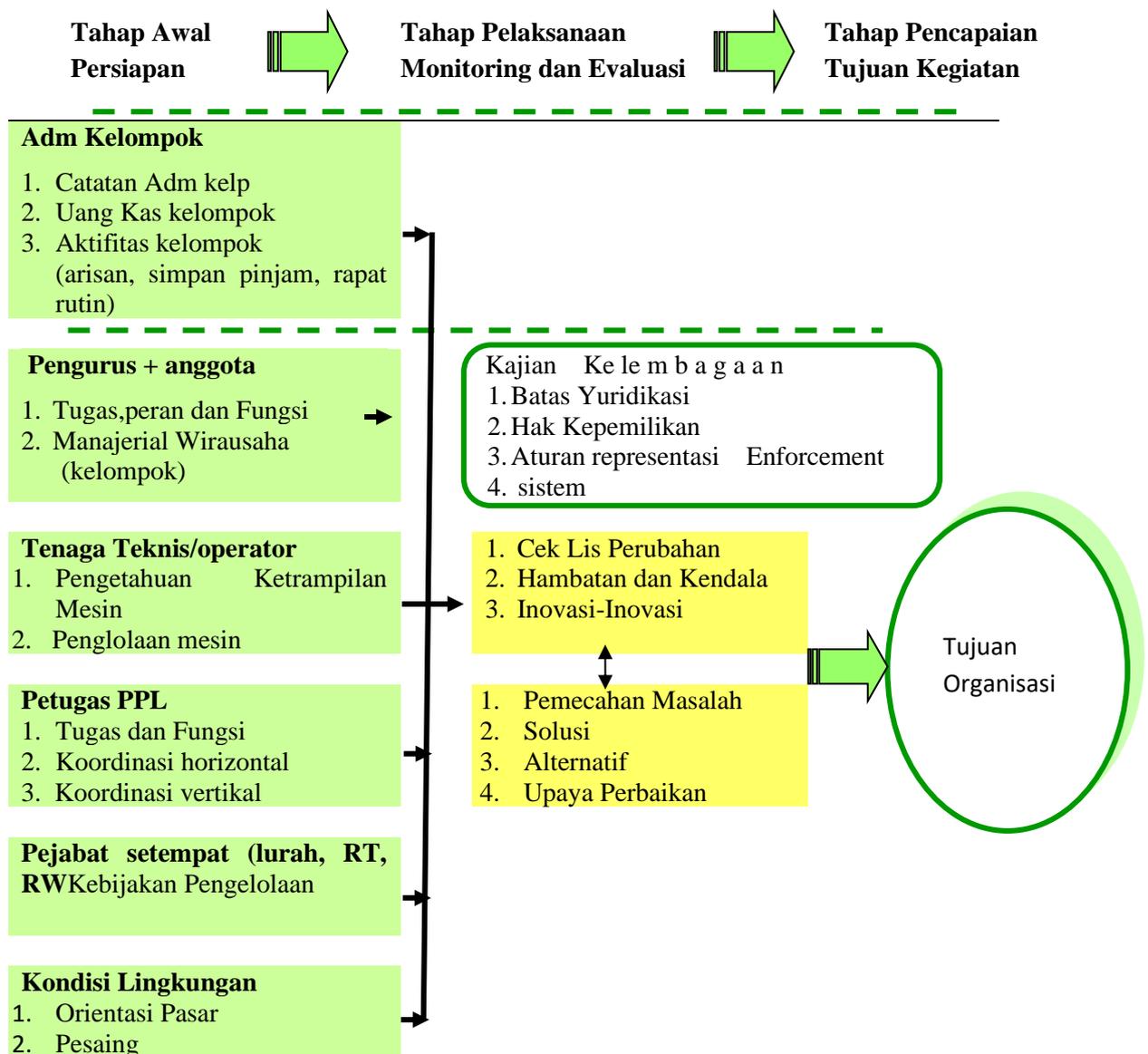
Kelembagaan pertanian (kelompok tani/lumbung pangan) pada pengembangan agribisnis hilir di Kota Metro. Tantangan dan persaingan peningkatan fungsi kelembagaan agribisnis adalah penguatan kemandirian petani dengan peningkatan fungsi kelompok tani sebagai unit produksi, sarana produksi, peningkatan nilai tambah dan nilai tukar (Tedjaningsih et al., 2018). Perubahan performa ke tiga kelompok lumbung pangan pengelola RMU belum nampak adanya kelompok yang mampu menumbuhkembangkan industri hilir maka upaya untuk perbaikan dalam kajian penelitian ini sebagaimana Gambar 1.

Strategi pengembangan usaha jasa alat mesin pertanian secara agresif dengan memanfaatkan semua kekuatan sebagai alternative melaksanakan sosialisasi, menumbuhkembangkan kerjasama dengan petani dan dukungan pemerintah daerah melalui instansi terkait serta secara operasional membuka kerjasama dan sinergi pada unit jasa pengelolaan mesin pertanian secara berkorporasi (Osak, 2020; Tarigan, 2019). Berdasarkan Gambar 2. beberapa alternatif yang dapat diturunkan sistem kelembagaan untuk pengembangan unit usaha:

1. Tahap awal persiapan kelembagaan lumbung pangan memiliki administrasi kelompok berupa catatan kelompok, uang kas kelompok, aktifitas kelompok seperti arisan, simpan pinjam rapat rutin berjalan

baik pada tahap administratif ini mencerminkan organisasi memiliki bekal administrasi dan adanya organisasi yang sedang berjalan unit tujuannya. Selanjutnya unsur-unsur kelembagaan sebagai pengelola diberikan persiapan sesuai peran dan fungsinya pada pengurusnya .

2. Tahap Pelaksanaan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan awal kegiatan, meliputi review hambatan dan kendala, pemecahan masalah dan solusi serta alternatif-alternatif tindakan. Permasalahan yang ada meliputi: (a) belum adanya penetapan keputusan secara bersama, (b) belum adanya mekanisme penyaluran konflik, (c) belum adanya cadangan kekayaan lembaga, (d) belum adanya sanksi yang mengikat, dan (e) belum adanya monitoring dan evaluasi yang jelas.
3. Tahap pencapaian tujuan menselaraskan hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian tujuan kelembagaan dengan standar kegiatan.



Gambar 1. Tata alir upaya sistem mengembangkan industri hilir pada kelompok Lumbung pangan pengelola RMU.

Prioritas strategi peningkatan kelayakan lembaga pada agribisnis hilir dengan pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang meningkat akan meningkatkan pendapatan, manusia sebagai mana bentuk modal seperti mesin (Hanna et al., 2021). Pengembangan sumberdaya manusia melalui

pelatihan dan pendampingan cukup sesuai untuk memenuhi kebutuhan kelayakan pengelolaan jasa mesin pertanian (Equation et al., 2019). Dari alternatif tersebut disusun beberapa skenario perbaikan sistem kelembagaan sebagai berikut:

1. Pada tahap awal ketiga kelompok lumbung pangan memperbaiki administrasi kelompok, mereposisi peran dan fungsi unsur organisasi, dan meningkatkan aktifitas kelompok dan menanggulangi kondisi lingkungan. Terkait tahapan membangun kelembagaan dapat diidentifikasi pengelolaan RMU masih berada pada tahap awal (tahap inisiasi) sehingga sangat rentan terhadap konflik.
2. Pada tahap pelaksanaan pemecahan masalah dari kelompok lumbung pangan Rukun Sentosa menangani masalah konflik dan solusi kemacetan usaha, terjadinya ketidak-aktifan RMU lebih banyak disebabkan karena persoalan kelembagaan yang menghambat tidak berkembangnya potensi petani, sehingga apabila tidak segera diatasi bisa berdampak pada perselisihan dan perpecahan;
3. Tahap pencapaian tujuan dengan mengevaluasi setiap unsur dalam pelaksanaan kegiatan dan pemecahan masalahnya. Aktual kelembagaan pengelolaan RMU terlihat masih belum dipahaminya kelembagaan yang terkait dalam kerangka pengembangan kelembagaan pengelolaan RMU. Rumitnya lembaga dan kelembagaan yang saling berinteraksi, walaupun sudah ada seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara individu dan lembaga, namun belum bisa memberikan keseimbangan antara harapan dan manfaat. Kelemahan pengelolaan kelembagaan jasa mesin pertanian belum adanya aturan baik secara organisasi sosial ataupun bisnis (Kelemahan et al., 2018). Memperbaiki kinerja manajemen sumberdaya manusia agar memiliki kapasitas baik dengan pembenahan dan perbaikan daya saing (Nasarudin, 2016). Kondisi yang ada pada ketiga kelompok lumbung sebagaimana Gambar 3.

Gambar 3. alternatif beberapa skenario perbaikan sistem kelembagaan sebagai

Tahap Awal Persiapan	Tahap Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Tahap Pencapaian Tujuan Kegiatan	Kondisi Ideal
			
<p><b>Internal Kelompok</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap kelompok calon penerima RMU merupakan kelompok dinamis dengan administrasi yang tercatat pada 8 buku wajib administrasi kelompok</li> <li>2. Memiliki pengurus &amp; anggota yang aktif dengan rencana kerja kelompok dan rencana usaha yang disetujui petugas terkait</li> <li>3. Memiliki sumber penambahan keuangan dan kas kelompok</li> </ol> <p><b>Eksternal Kelompok</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria penentuan lokasi (lokasi strategis unit usaha dapat berjalan)</li> <li>2. Peluang dan hambatan perkembangan unit usaha (pesaing)/faktor pendukung</li> <li>3. Adanya unit jasa pendukung ( bengkel alsintan)</li> </ol>	<p>Ada follow up, monitoring dan evaluasi kegiatan dari instansi terkait Pada kondisi internal dan eksternal persiapan kelompok</p>	<p>Berlakukan sanksi bila tidak ada memenuhi kriteria internal dan eksternal</p> <p>Adanya tindakan--perbaikan</p>	<p>Tercapai tujuan dan sasaran program bantuan hibah 1 unit huller sebagai unit usaha produktif dikelompok dengan kriteria:</p>
<p><b>Diberikan Bantuan 1 Unit RMU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok/SDM dibekali ketrampilan teknis mesin RMU non teknis kelompok</li> <li>2. Manajemen usaha berkelompok (pemasaran, kemitraan dll)</li> <li>3. Adanya petugas pendamping sbg pembina ke kompakan kelompok, berjalannya unit usaha</li> </ol>	<p>Adanya indikator pencapaian kegiatan</p>	<p>Berlakukan sanksi bila tidak ada memenuhi kriteria indikator Pencapaian kegiatan Adanya tindakan--perbaikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan jasa pasca panen di dalam kelompokdan luar anggota kelompok</li> <li>2. Kelompok memiliki Sumber pendapatan</li> </ol>
<p><b>Menggerakkan Unit Usaha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian target kegiatan sesuai rencana usaha sesuai proposal kegiatan RUK/RKK</li> <li>2. Perencanaa pengembangan Usaha pada periode tertentu (musiman/ pertengahan/tahun/tahun)</li> </ol>	<p>Adanya unit usaha produktif di kelompok</p>	<p>Berlakukan sanksi bila tidak ada memenuhi kriteria produktif Adanya tindakan--perbaikan</p>	
<p><b>Pengembangan Usaha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama/mitra internal kelompok ( antara kelembagaan pertanian)</li> <li>2. Kerjasama/mitra eksternal kelompok ( diluar kelembagaan pertanian)</li> </ol>	<p>Adanya indikator pengembangan kelompok</p>	<p>Berlakukan sanksi bila tidak ada memenuhi kriteria indikator Adanya tindakan--perbaikan</p>	

## KESIMPULAN

Kelayakan usaha agribisnis hilir pelayanan jasa pengelolaan Rice milling Unit kategori layak terdapat pada kelompok Melati 2 dengan Performa kelembagaan terpenuhi administrasi kelompok, berperannya tugas dan fungsi pengurus dan anggota, berjalannya fungsi kelembagaan dan terdapat unit usaha yang berjalan layak. Saran Kelompok lumbung segera memperbaiki kelembagaannya dan meningkatkan aktifitas kelompok dengan memperbaiki unsur – unsur kelembagaannya manajemen usaha kelompok, mengatasi konflik, kekompakan, komitmen dan loyalitas, adopsi teknologi menguasai peralatan mesin dan menjalin kerjasama lintas kelompok. Kebijakan pemerintah yang diimplementasikan pada pemberian bantuan Unit usaha alat dan mesin pertanian (RMU) hendaknya mempertimbangkan Kesiapan aspek kelembagaan serta kesiapan kelompok penerima bantuan dalam hal keterampilan mesin, manajemen kelompok, modal kelompok maupun non teknis (inovasi pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan periode tertentu).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldillah, R. (2016). Kinerja Pemanfaatan Mekanisasi Pertanian dan Implikasinya dalam Upaya Percepatan Produksi Pangan di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(2), 163. <https://doi.org/10.21082/fae.v34n2.2016.163-171>
- Amalia, A. F., Rahayu, H. S. P., Syafruddin, & Suwitra, I. K. (2021). Performance of agricultural machinery services business in Tojo Una-Una District Central Sulawesi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 782(2). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/782/2/022062>
- Ditjen PSP. (2015). *Ditjen PS. Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian. Pedoman pelaksanaan dan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian.*
- Dwi Rustan Kendaro. (2016). Analisis Perhitungan Kebutuhan Optimum Traktor Roda Dua Di Kabupaten Bandung. *...Jurnal Teknotan, Vol. 10 No.*
- Equation, S., Studi, M., & Pangandaran, K. (2019). *Strategi peningkatan kinerja upja menggunakan pendekatan. November.*
- Gray, C. dkk. (1999). *Pengantar Evaluasi Proyek.* PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hanna, E., Gosal, E., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2021). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Analisis Pengaruh Bantuan Pemerintah , Modal Insani ( Human Capital ) Dan Bahan Baku Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Minahasa Tenggara Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah . 22(2), 113–131.*
- Indaryati, S. (2019). Peran Performa Kelembagaan Tani Terhadap Pengembangan Subsistem Agribisnis Hilir Di Kota Metro. *Journal of Food System & Agribusiness*, 2(2), 83–93. <https://doi.org/10.25181/jofsa.v2i2.1114>
- Ismail, U. P., Khairizal, K., & Wahyudy, H. A. (2018). Kebutuhan Mesin Pertanian Dan Tenaga Untuk Mekanisasi Usahatani Padi Skala Kecil Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Dinamika Pertanian*, 33(2), 11. [https://doi.org/10.25299/dp.2017.vol33\(2\).813](https://doi.org/10.25299/dp.2017.vol33(2).813)
- Kelemahan, A., Poktan, R., Lkm-a, D. A. N., & Hanggana, S. (2018). *5hxxodwlrqv : Hdnqhv \$ Qdo \ Vlv Ri ) Duphuv ¶ \* Urxs \* Dsrnwdq 83- \$ Dqg Lkm-A in Order to Enhance Farmers ' Income. 15(2), 137–149.*
- Keumala Fadhiela, Rachmina Dwi, W. R. (2018). *Di Kabupaten Aceh Tengah.* 6(1), 49–60.
- Mesin, D. A. N., Upja, P., & Tani, B. (2021). *Kelayakan Usaha Pelayanan Jasa Alat.* 1(1), 11–20.

- Mulatsih, S. (2016). Peran Aktor Dan Pemangku Kepentingan Bidang Alsintan. *Jurnal Standardisasi*, 18(1), 71–82.
- Mulyani, Umay., Yusmini & Edwina, S. (2016). Financial Feasibility Analysys of Business. *Faperta*, 3(1).
- Nasarudin, I. Y. (2016). Analisis Kelayakan Ekonomi Dan Finansial Usaha Batik Papua Studi Kasus Pada Perusahaan Batik Port Numbay Papua. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan/ Journal of Theory and Applied Management*, 7(1), 65–77. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v7i1.2686>
- Nuraini, C. (2016). Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Agraris*.
- Osak, R. E. M. F. (2020). Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian ( Upja ) Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (September), 457–468.
- Rukmana, D., Indriani, E., Fudjaja, L., Fahmid, M., & Diansari, P. (2021). Effectiveness of management and utilization of agricultural equipment and machinery assistance (ALSINTAN) by recipient farmer groups in South Sulawesi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 807(3), 032081. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/807/3/032081>
- Tarigan, H. (2019). Mekanisasi Pertanian Dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan ( UPJA ) Agricultural Mechanization and Agricultural Machinery Services Business ( UPJA ) Development. 36(2), 117–128.
- Tasik, A., Fallo, Y. M., & Joka, U. (2020). Analisis Kelayakan Finansial Industri Rumahtangga Pangan ( Studi Kasus Usaha Tahu Alfaria , Kota Kefamenanu ) Financial Feasibility Analysis of Food Homeindustry ( Case Study of Alfaria Tofu Industry , Kefamenanu City ). 20(3), 218–229.
- Tedjaningsih, T., Suyudi, S., & Nuryaman, H. (2018). Peran Kelembagaan Dalam Pengembangan Agribisnis Mendong. *MIMBAR AGRIBISNIS: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 4(2), 210. <https://doi.org/10.25157/ma.v4i2.898>
- Tri Bastuti Purwantini dan Sri Hery Susilowati. (2018). Dampak Penggunaan Alat Mesin Panen Terhadap Kelembagaan Usaha Tani Padi. *Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 16 No.*
- Zulkarnain, Z., & Mangiring, W. (2018). Analisis Biaya Transaksi pada Kelembagaan Pertanian Gapoktan Penerima Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 17(3), 186. <https://doi.org/10.25181/jppt.v17i3.325>